

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abbas Salim. (2008). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdulkadir Muhammad. (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti, S. d. (2016). *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur negara (Yogyakarta: Pustaka Yustisia*.
- Basu, Swastha DH. (1985). *Asas-asas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Daan Sugandha. (1989). *Pengantar Administrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- E. Lubis. (2012). *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Hadari, Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- H.M.N. Purwosucipto (1983). *Pengertian Pokok Hukum Dagang 5, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*. Bandung: Djambatan.
- Mathew B. Milles, A. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Yanto SH. (2014). *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R. B. Cribb, Micheal Ford, (2009). *Indonesia Beyond the Water's Edge : Managing an Archipelagic State*. Singapore: ISEAS.
- romli Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujamto. (1986). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tommy H. Purwaka. (1993). *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*. Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara.
- Tri Cahyadi. (2017). *Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wiwoho Soedjono. (1986). *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Reden Reglements Tahun 1925 atau Peraturan Bandar
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut

C. Jurnal

- Achmad Ali, 2010. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jurnal Hukum, Vol. 1. hlm 375
- Andre Griffin, 1994. *Marpol 73/78 and Vessel Pollution: a Glass Half Full or Half Empty?*. Indiana Journal of Global Legal Studies. Hlm. 1
- Budisutrisna, 2016. *Komparasi Teori Kebenaran Mo Tzu dan Pancasila: Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jurnal Filsafat. Vol.26, No.1
- Jusna dan Tibertius Nempung. 201. *Peranan transportasi laut dalam menunjang arus barang dan orang di kecamatan maligano kabupaten muna*. Jurnal Ekonomi. Vol.1, No. 1.
- J Viana I R br Barus, Paramita Prananingtyas, S. M. 2017. *Tugas dan tanggung jawab syahbandar dalam kegiatan pengangkutan laut di indonesia*. diponegoro law journal. Vol.6(1), hlm. 1–13.
- Randy Y.C.Aguw. 2013. *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Lex Administratum, Vol.1. hlm. 46-47.
- Tommy H. Purwaka. 1993. *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan*

*Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran,
Pusat Studi Wawasan Nusantara, hlm. 1*

D. Website

<https://media.neliti.com/media/publications/59543-ID-tugas-dan-tanggung-jawabsyahbandar-dala.pdf>. diakses tanggal 26 februari 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 15 Februari 2022

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-syahbandar> diakses tanggal 28 februari 2022

[https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Pemerintah%20mencatat%20jumlah,Names%20\(UNGEKN\)%20tahun%20202](https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Pemerintah%20mencatat%20jumlah,Names%20(UNGEKN)%20tahun%20202)

<http://dephub.go.id/org/uppsikakap/sejarah>

